

# REKOMENDASI ANALISIS PENYAKIT POLIO



DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO

2025

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penyakit

Virus Polio adalah Virus yang termasuk dalam golongan Human Enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (Brunhilde), strain-2 (Lansig), dan strain-3 (Leon), termasuk family Picornaviridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus.

Kebanyakan orang yang terinfeksi (90%) tidak mengalami gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain gejala awal yaitu Demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher dan nyeri di tungkai.

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menangani wabah virus polio ini. Dengan adanya resolusi WHO dan program The Global Polio Eradication Initiative pada tahun 1988, Indonesia telah melaksanakan program imunisasi nasional polio selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 1995, 1996 dan 1997, serta telah berhasil memberantas virus polio di Indonesia sejak tahun 1996. Namun pada 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio pertama di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sehingga dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2006, kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang, dan tersebar di 47 kabupaten/ kota di 10 provinsi di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, tingkat vaksinasi anak secara global terhadap polio dan program vaksinasi lainnya termasuk di Indonesia, mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini dapat berakibat pada penyebaran kembali virus polio di beberapa negara termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, cakupan vaksinasi polio harus tetap tinggi dan upaya pengawasan perlu terus ditingkatkan. Penemuan kasus polio baru-baru ini, termasuk di negara-negara yang selama beberapa dekade tidak ditemukan lagi kasus polio, merupakan peringatan kuat bahwa setiap negara tetap berisiko mengalami munculnya kembali kasus polio sampai virus polio dieradikasi di seluruh dunia.

Imunisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kasus polio. Upaya untuk meningkatkan capaian dan cakupan imunisasi perlu terus ditingkatkan. Selain itu pemerintah perlu memastikan sistem surveilans kesehatan berjalan secara optimal, dan peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui kerjasama para pemangku kepentingan termasuk peran aktif para tokoh masyarakat untuk berkomitmen guna terus mempertahankan status bebas polio ini di Indonesia.

# Analisis Risiko POLIO Tahun 2025

Kota/Kab. Poso - Provinsi Sulawesi Tengah

## RESUME:

ANCAMAN	27.97
KERENTANAN	14.65
KAPASITAS	43.38
RISIKO	9.45
Derajat Risiko	<b>SEDANG</b>

## B. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Polio.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Poso.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
4. Pembuatan rekomendasi ini sebagai dasar bagi daerah untuk perencanaan kegiatan dalam kesiapsiagaan menghadapi penyakit Polio ataupun potensi wabah di Poso.

## HASIL PEMETAAN RISIKO

### A. Penilaian Ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Poso, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PERKATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penyakit	Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli)	T	13.55	13.55
2	Pengobatan	Pengobatan (literatur/tim ahli)	T	1.91	1.91
3	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli)	S	10.50	1.05
4	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli)	A	13.16	0.01
5	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli)	S	13.95	1.40
6	Risiko importasi	Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli)	T	8.47	8.47
7	Risiko importasi	Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia	S	8.47	0.85
8	Risiko penularan setempat	Risiko penularan setempat	A	8.71	0.01
9	Dampak wilayah	Dampak wilayah (periode KLB)	S	6.01	0.60
10	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB	R	6.81	0.07
11	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP)	R	5.22	0.05
12	Dampak Sosial	Perhatian media	A	3.24	0.00

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Ancaman Kabupaten Poso Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

- 1) Subkategori Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli), alasan berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian ahli
- 2) Subkategori Pengobatan (literatur/tim ahli), alasan berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian ahli
- 3) Subkategori Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli), alasan berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian ahli

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

- 1) Subkategori Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli), alasan berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian ahli
- 2) Subkategori Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli), alasan berdasarkan hasil pertimbangan dan penilaian ahli
- 3) Subkategori Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia, alasan berisiko sedang karena pada tahun 2024 dikabupaten lain di Indonesia ada kasus polio sedangkan di kabupaten poso tidak ada kasus
- 4) Subkategori Dampak wilayah (periode KLB), alasan tidak terdampak karena tidak terdapat kasus tunggal maupun klaster di kabupaten poso

## B. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PERKATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penduduk	Kepadatan Penduduk	R	13.64	0.14
2	Ketahanan Penduduk	% cakupan imunisasi polio 4	S	27.99	2.80
3	Ketahanan Penduduk	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	S	31.10	3.11
4	Karakteristik Lingkungan Berisiko	% sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	S	20.74	2.07
5	Transportasi Antar Kab/Kota/ Provinsi	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	T	6.53	6.53

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kerentanan Kabupaten Poso Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 1 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

- 1) Subkategori Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi, alasan karena di kabupaten poso terdapat pelabuhan laut dan adanya frekuensi bus antar kota setiap hari

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

- 1) Subkategori % cakupan imunisasi polio 4, alasan cakupan Imunisasi Polio 4 dari 3.336 anak yang mendapatkan imunisasi 2.625 anak, hal ini menunjukkan capaian cakupan imunisasi cukup memenuhi dan masih ada anak yang belum di imunisasi.
- 2) Subkategori % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS), alasan belum semua dilakukan pemeriksaan Air minum rumah tangga oleh puskesmas, untuk SBABS masih ada rumah tangga yang belum memiliki Jamban
- 3) Subkategori % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat, alasan belum semua sarana air minum dilakukan pemeriksaan karena belum dilakukan pemeriksaan rutin dari puskesmas dan masih ada cakupan sarana air minum yang tidak memenuhi syarat

### C. Penilaian Kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

N o.	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOB OT (B)	INDEX (NXB)
1	Kebijakan publik	Kebijakan publik	R	3.52	0.04
2	Kelembagaan	Kelembagaan	T	3.52	3.52
3	Program pencegahan dan pengendalian	Program imunisasi	T	7.75	7.75
4	Program pencegahan dan pengendalian	Pengobatan massal (PIN Polio)	S	2.37	0.24
5	Program pencegahan dan pengendalian	Pengendalian lingkungan dan Perilaku	T	3.15	3.15
6	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	S	6.66	0.67

7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	R	3.40	0.03
8	Surveilans	Surveilans (SKD)	A	8.89	0.01
9	Surveilans	Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance)	T	7.06	7.06
10	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)	R	9.08	0.09
11	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS)	S	11.20	1.12
12	Surveilans	Surveilans AFP	T	10.10	10.10
13	PE dan penanggulangan KLB	PE dan penanggulangan KLB	R	12.06	0.12
14	Kapasitas Lab	Kapasitas Laboratorium	A	1.75	0.00
15	Promosi	Media Promosi Kesehatan	T	9.48	9.48

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kapasitas Kabupaten Poso Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Abai, yaitu :

1. Subkategori 8a. Surveilans (SKD), alasan ada tim pelaksana kewaspadaan dini termasuk Polio di Dinas Kesehatan Kab. Poso namun belum semua memiliki sertifikat pelatihan kewaspadaan dini penyakit termasuk polio dan ada publikasi penyebarluasan hasil analisis SKDR namun belum rutin
2. Subkategori Kapasitas Laboratorium, alasan Karena Waktu yang diperlukan (hari) untuk memperoleh konfirmasi hasil pemeriksaan spesimen polio adalah 14 hari

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Kebijakan publik, alasan karena tidak ada Kebijakan Kewaspadaan Polio, tetapi menjadi perhatian Tingkat Kepala Bidang terkait.
2. Subkategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alasan karena ruang isolasi masih kurang dari 60%
3. Subkategori 8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas), alasan DO dokter di Fasyankes dengan DO Program Surveilans ada kesenjangan.
4. Subkategori PE dan penanggulangan KLB, alasan karena belum semua petugas atau Tim Kewaspadaan Dini memiliki sertifikat.

#### D. Karakteristik Risiko (Tinggi, Rendah, Sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Polio didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik risiko Kabupaten Poso dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Sulawesi Tengah
Kota	Poso
Tahun	2025

RESUME ANALISIS RISIKO POLIO	
Ancaman	27.97
Kerentanan	14.65
Kapasitas	43.38
<b>RISIKO</b>	<b>9.45</b>
Derajat Risiko	<b>SEDANG</b>

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Polio Kabupaten Poso Tahun 2024.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Polio di Kabupaten Poso untuk tahun 2024, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 27.97 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 14.65 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 43.38 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 9.45 atau derajat risiko SEDANG

#### 5. Rekomendasi

N O	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELIN E	KET
1	% cakupan imunisasi polio 4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mempertahankan dan meningkatkan cakupan imunisasi Polio hingga mencapai <math>\geq 95\%</math> di seluruh wilayah, dengan fokus pada daerah yang masih rendah cakupannya.</li><li>- Mengoptimalkan kegiatan surveilans AFP melalui peningkatan deteksi dini, pelaporan cepat, dan pemeriksaan laboratorium terhadap setiap kasus lumpuh layuh akut.</li><li>- Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelaksanaan</li></ul>	Pengelola Program Imunisasi  Prog. Surveilans  Prog. Surveilans	Okt-Des 2025  Okt-Des 2025  Okt-des	

		<p>surveilans, imunisasi, dan komunikasi risiko melalui pelatihan dan supervisi berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat koordinasi lintas sektor (pemerintah daerah, pendidikan, dan tokoh masyarakat) untuk mendukung pelaksanaan imunisasi dan kampanye kesadaran Masyarakat.</li> </ul>	<p>dan Prog. Imunisasi</p> <p>Prog. Imunisasi</p>	<p>2025</p> <p>Okt-Des 2025</p>	
2	Perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kebersihan diri (personal hygiene), terutama dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah merawat anak.</li> <li>- Menggunakan jamban sehat serta menghindari buang air besar di tempat terbuka untuk mencegah kontaminasi lingkungan.</li> <li>- Mengaktifkan peran keluarga dan kader kesehatan dalam pemantauan imunisasi anak dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</li> </ul>	Program Kesehatan Lingkungan	Okt-Des 2025	
3	Surveilans SKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan aktif di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.</li> <li>- Melatih petugas Puskesmas agar mampu mengenali dan melaporkan kasus AFP secara cepat.</li> <li>- Mengoptimalkan Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat kabupaten dan puskesmas untuk melakukan investigasi segera (&lt;48 jam).</li> <li>- Menyediakan supervisi dan pendampingan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi.</li> <li>- Melibatkan sektor pendidikan, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaporan gejala lumpuh layuh mendadak.</li> <li>- Sinkronisasi data antara program imunisasi, surveilans penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.</li> <li>- Menyebarkan informasi tentang pentingnya melapor bila ada anak dengan gejala lumpuh mendadak.</li> <li>- Melakukan audit kasus AFP dan umpan balik hasil surveilans ke seluruh puskesmas.</li> </ul>	Program Surveilans	2026	

Poso, November 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN POSO**



**dr. N. Taufan Karwur**

Pembina Utama Muda / IV c  
Nip. 19670527 199803 1 005